

Wartawan Banyumas Dapat Bantuan



KR-Istimewa

Wakil Ketua PWI Banyumas menyerahkan bantuan.

BANYUMAS (KR) - Sembilan wartawan terparap Covid-19 dan sejumlah wartawan yang terdampak Covid-19 di Banyumas menerima bantuan dari berbagai pihak, Jumat (30/7). Di antaranya PT BPR BKK Purwokerto melalui CSR, dengan total bantuan Rp 5 juta, terdiri Rp 1 juta berujud sembako dan Rp 4 juta tunai.

Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto, Sugeng Priyono mengatakan pihaknya memberikan bantuan kepada wartawan, karena sejauh ini mereka menjadi kelompok yang rentan dan jarang tersentuh. "Ini merupakan bagian dari program Jogo Tonggo. Hingga Juli ini dana CSR yang disalurkan Rp 426 juta. Total selama tahun 2021, dana CSR dari PT BPR BKK mencapai Rp 780 juta," ungkapnya. Ketu PWI Banyumas Lilik Darmawan mengapresiasi PT BPR BKK yang telah memberikan bantuan kepada wartawan. (Dri)

DI PEMKAB REMBANG THL Bisa Jadi Bumerang

REMBANG (KR) - Jumlah pegawai honor daerah atau tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah kabupaten Rembang terus bertambah dan menjadi perimbangan publik. Pengamat politik dan sosial di Rembang, H Sukaryono menilai keberadaan THL sarat dengan KKN dan keberadaannya sudah pada tingkat mencemaskan. Bahkan keberadaan THL bisa menjadi bumerang bagi Bupati Rembang. "Ini kesalahan Bupati Rembang H Abdul Hafid yang telah menampung sekian ribu THL yang dibiayai APBD," kata H Sukaryono, Kamis (29/7).

Beberapa sumber di lingkungan Pemkab Rembang juga mengeluhkan semakin bertambahnya THL tanpa kemampuan dan pekerjaan yang jelas. Mereka terdiri lulusan SLTA hingga sarjana dari berbagai disiplin ilmu. "THL lulusan SLTA menerima gaji Rp 1,2 juta perbulan, sedangkan THL sarjana menerima gaji Rp 1,8 juta perbulan," ungkap sumber KR. Bupati Rembang Abdul Hafid beberapa kali belum dapat dikonfirmasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang Drs Suparmin melalui telepon membenarkan soal keberadaan THL tersebut, namun ia mengaku tidak hafal mengenai jumlah dan anggaran untuk membayar mereka. "Saya tidak hafal tentang jumlah tenaga THL berikut anggarannya," tandasnya. (Ags)

VINO JADI BOCAH SEBATANG KARA

Pemkab Sragen Kirim Tim Penjemput

SRAGEN (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengirimkan tim untuk menjemput Alviano Dava Raharjo alias Vino (10), bocah yang tinggal sebatang kara usai kedua orangtuanya meninggal dunia terparap Covid-19 di perantaraan Kutai Barat Kaltim.

Tim penjemput Vino yang terdiri Zainuri (petugas Dinas Sosial Sragen) setempat dan Yatin (kakek Vino) diberangkatkan oleh Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dari pendapa rumah dinas (Rumdin) bupati, Jumat (30/7). Penjemputan Vino untuk dibawa pulang ke kampung halaman orangtuanya di Sragen, merupakan pesan terakhir almarhum bapaknya, Kino Raharjo, sesaat sebelum meninggal dunia. "Sebelum meninggal, bapak Vino menyampaikan wasiat agar anaknya dibawa pulang ke Sragen," ujar Yuni setelah melepas tim penjemput.

Vino sempat viral saat kisahnya mencuat lewat pemberitaan. Ia sedang menjalani isolasi mandiri seorang diri di rumahnya, setelah kepergian kedua orangtuanya yang positif terparap Covid-19. Sang ibu, Lina Safitri (31) meninggal dalam kondisi hamil lima bulan pada Senin (19/7). Bapaknya, Kino Raharjo (31) meninggal keesokan harinya, Selasa (20/7). Pasangan dari Sragen ini tinggal di kampung Linggang, Desa Purworejo, RT 04 Kecamatan Tering, Kutai Barat Kaltim. Ayah Vino merantau di Kubar sebagai penjual pentol keliling.

Menurut Yuni, Pemkab juga akan terus melakukan pendampingan terhadap Vino setibanya di Sragen. "Kami siap untuk membantu, walaupun tentu beda pada saat ada ayah-bundanya. Keluarga besar di Sragen akan bersama-sama membesarkan Vino," tandasnya.

Kakek Vino, Yatin menyebut saat ini cucunya dalam kondisi sehat. Vino sendiri sempat terparap Covid-19 namun telah selesai menjalani isolasi mandiri pada 26 Juli lalu. Ia sempat berkomunikasi dengan cucunya via telepon.

Bahkan Vino minta agar

ketika sampai di Kalimantan tidak bersedih.

Saat ini, pihak keluarga belum memastikan Vino akan tinggal di keluarga ibunya di Sambungmacan atau di keluarga ayahnya di Sambirejo. Pihak keluarga akan menyerahkan keputusan kepada Vino setiba di Sragen.

"Itu belum tahu tinggal dimana, nanti tinggal Vino pilih di siapa. Kalau milih di Sambungmacan tidak

masalah, di Sambirejo juga tidak masalah," ungkap Yatin.

Sementara itu petugas pendampingan dari Dinsos Sragen, Zainuri mengungkapkan, rombongan akan menempuh jalur darat, kemudian naik pesawat dari Surabaya menuju Balikpapan. Dari Balikpapan, rombongan masih harus menempuh 13 jam perjalanan lewat darat menuju Kutai Barat. (Sam)



KR-Said Masykuri

Kusdinar Untung Yuni Sukowati (tengah) saat melepas tim penjemput Vino.

LAHAN DAN DANA TERBATAS

Warga Bangun Masjid Berbentuk Kabah

PURBALINGGA (KR) - Masjid berbentuk mirip kabah berdiri megah di wilayah RT 05 RW 02 Dusun Kedungdawa Kelurahan



KR-Toto Rusmanto

Masjid berbentuk kabah di Dusun Kedungdawa Kelurahan Bojong Purbalingga.

an Bojong Purbalingga. Berbeda dengan kebanyakan masjid dan musola lainnya. Masjid itu berbentuk kotak dengan warna hi-

tam, tidan ada kubah di bagian atap. "Masjid ini dibangun dengan arsitektur seperti kabah, karena kami terkendala lahan dan dana," ungkap Maryono, Ketua RT 05 RW 02 Dusun Kedungdawa.

Menurut Maryono yang juga mendesain bentuk bangunan itu, lahan wakaf yang digunakan untuk membangun masjid itu hanya berukuran 7X12 meter, sehingga bila dibangun seperti masjid atau musola pada umumnya akan sangat terkesan sempit. "Pantia pembangunan masjid sepatkat tidak memakai serambi. Setelah digambar-

gambar, muncul ide bentuk kabah itu," jelasnya.

Setelah sepatkat masjid dibangun menyerupai kabah, komponen kubah di atap juga dihilangkan. Apalagi setelah dilakukan survei harga, kubah ukuran sedang mencapai sekitar Rp 45 Juta. Masjid yang belum sepenuhnya jadi ini mulai dibangun sekitar bulan Maret. Tidak kurang dari Rp 300 juta sudah terserap dalam proses pembangunannya. Sumber dana berasal dari swadaya warga, termasuk pengerjaannya. "Donatur kebanyakan warga asli sini yang merantau atau sudah

domisili di luar kota. Warga berharap nantinya peresmian masjid dilakukan oleh Bupati Purbalingga," ungkap Maryono.

Dalam memungut sumbangan, setiap kepala keluarga (KK) diberi amplop kosong. Selanjutnya warga mengisi dengan nominal sukarela dan selanjutnya dikumpulkan dalam sebuah kotak di lahan sekitar lokasi masjid. "Donasi dengan amplop itu untuk mengantisipasi kesenjangan. Kalau pakai catatan, warga akan melihat besaran sumbangan dari warga yang lain. Malah bisa bikin minder," tandasnya. (Rus)

HUKUM

DEVIDEN TAK DAPAT MALAH DITAGIH PAJAK SPDP Terbit, Terlapor Segera Diperiksa

SLEMAN (KR) - Setelah menunggu sekitar 6 bulan akhirnya pengusaha asal Bantul, Endang Riwayatini (42) bisa merasa lega, sebab Polda DIY akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporannya terhadap RD (57) warga Mlati Sleman, terkait dugaan tidak memberikan deviden perusahaan yang menjadi hak pelapor, nilainya sebesar Rp 17 miliar.

Penasihat hukum pelapor, Syaiful Anam SH, Jumat (29/7), menjelaskan setelah SPDP terbit, kliennya juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik dan diharapkan terlapor juga secepatnya diperiksa.

"Klien kami Ny Endang sudah diperiksa dan semua data yang kami miliki juga sudah disampaikan ke penyidik. Untuk itu kami berharap terlapor segera diperiksa dan proses hukum kasus ini semakin cepat," jelasnya.

Diungkapkan, kliennya dengan terlapor merupakan pemegang saham di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Di perusahaan yang berlokasi di wilayah Bantul itu, Endang mempunyai saham sebanyak 49 persen,

sedangkan sisanya milik terlapor. "Sebagai pemegang saham, klien saya seharusnya mendapatkan deviden dari perusahaan. Namun hal itu tidak didapatkan oleh klien saya sejak tahun 2008 hingga pertengahan 2018 yang nominalnya sekitar Rp 17 miliar," jelas Syaiful Anam.

Upaya kekeluargaan hingga somasi, sudah dilakukan oleh pelapor kepada rekan bisnis sekaligus mantan suaminya itu. Namun karena tidak membuahkan hasil, kasus itu akhirnya dilaporkan ke polisi.

Syaiful Anam menyebut, ada sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada penyidik. Antara lain, akta pendirian perusahaan, bukti lembar saham dan surat penagihan pajak.

Diakui, hasil investigasi Kantor Pajak Pratama Bantul terungkap jika pelapor memiliki saham di perusahaan Het Pakhuis Limited secara sah. Sehingga dikeluarkan tagihan pajak kepada pelapor sebesar Rp 372 juta. "Padahal selama ini pelapor sama sekali tidak mendapat deviden dari perusahaan yang dikelola terlapor tersebut," tuturnya. (Zie)

DUGAAN PUNGLI TERJADI Pengantar Bantuan PKH Minta Uang ke Warga

SLAWATI (KR) - Penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tegal, terpaksa melapor ke anggota DPRD setempat, karena dana itu dipotong Rp 15.000 oleh oknum petugas pengantar bantuan PKH tersebut. Hal itu terjadi di Desa Kajen Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Bintang Adi Prajamukti, Rabu (28/7), membenarkan pihaknya mendapatkan laporan dari salah satu warga mengenai hal itu. Saat mendapat bantuan sembako, petugas minta uang Rp 15 ribu.

Berdasarkan informasi dari salah satu warga Kajen, bantuan tersebut berupa beras 10 Kg, tempe dan buah. Uang itu diminta saat petugas yang menyerahkan bantuan datang ke rumah.

"Saat saya tanya nama petugas yang memotong uang itu, pihak pelapor tidak tahu dan tidak mengetahui asal petugas

tersebut. Namun bantuan itu biasanya melalui RT," ujarnya.

Adi mengungkapkan, pelapor juga menyampaikan jika pengambilan melalui balai desa, tidak dipotong biaya. Atas laporan itu, ia meminta dinas terkait untuk mengecek kebenaran laporan itu.

"Kejadian seperti ini mungkin bisa saja terjadi di wilayah lainnya. Untuk itu, dinas terkait diminta untuk menindaklanjuti," tegas Adi.

Secara aturan, tidak diperbolehkan memungut uang kepada penerima bantuan. Hal itu dinilai sebagai bentuk pungutan liar karena dalam situasi yang sulit ini, bantuan sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu dan tidak boleh dipotong dengan dalih apapun.

"Apalagi ini kan lagi pemberlakuan PPKM Darurat, aktivitas warga dibatasi. Beribas pada penurunnya tingkat pendapatan warga," tegas Adi. (Ryd)

BARANG DI RUMAH KORBAN MASIH UTUH

Siswa Kelas 3 SMP Diduga Sengaja Dibunuh

SLEMAN (KR) - Kasus pembunuhan yang dialami siswa SMP, Satria Yuda Pratama (14) warga Kedulan Tirtomartani Kalasan Sleman, hingga Jumat (30/7) belum menemukan titik terang. Dari delapan saksi yang diperiksa, belum satu pun yang mengarah ke identitas pelaku pembunuhan sadis tersebut.

"Ada delapan orang yang sudah kami periksa sebagai saksi, termasuk pelapor. Dari keterangan para saksi, belum ada yang mengarah ke pelaku. Mohon doanya, agar kasus ini segera terungkap," ungkap Panit Reskrim Polsek Kalasan Iptu Sri Pujo.

Sri Pujo menjelaskan, dari keterangan para saksi, tidak ada yang melihat secara langsung aksi sadis yang terjadi Rabu (28/7)

malam itu. Ia menduga, saat eksekusi pelaku menutup pintu rumah bercat pink yang selama ini ditinggali oleh korban dengan ibunya.

Sementara itu dari olah TKP, Panit memastikan tidak ada satu pun barang berharga di rumah korban yang hilang.

"Tidak ada barang yang hilang, masih utuh. Itu korban sengaja dibunuh, namun pelaku belum mengarah ke siapa dan masih ka-

mi selidiki," tandasnya.

Sri Pujo menambahkan, ibu korban yang pertama kali melihat anaknya tak bernyawa, hingga Jumat pagi ini belum bisa dimintai keterangan karena masih syok.

Sementara itu barang bukti yang diamankan antara lain baju yang saat kejadian dikenakan korban. Pihaknya saat ini juga masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian siswa

SMP kelas tiga tersebut.

Seperti diketahui, korban ditemukan tewas bersimbah darah di lantai ruang keluarga rumahnya. Saat kejadian, korban sedang yang yatim sejak lima tahun lalu itu sedang sendiri di rumah, sedangkan ibunya, Maryani, sedang rapat di padukuhan setempat.

Korban diketahui sempat mengirimkan pesan WhatsApp yang meminta agar ibunya segera pulang sekitar pukul 19.00. Saat sang ibu tiba di rumah sekitar satu jam kemudian, korban sudah tidak bernyawa dengan banyak luka di hampir seluruh tubuhnya. (Ayu)

KPM TAK MENDAPATKAN HAK YANG SESUAI Bantuan Berkurang, Polisi Turun Tangan

PURWOKERTO (KR) - Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas menindaklanjuti aduan warga berkaitan dugaan pengurangan jumlah komoditi sayur jenis kentang untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Banyumas.

"Setelah ada aduan dari warga polisi menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kepada warga yang mengadu," jelas Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Berry, Kamis (29/7).

Aduan ke Satreskrim Polresta Banyumas dilakukan warga KPM di Kecamatan Cilongok. Mereka kecewa dengan paket BPNT untuk komoditi sayuran dalam bentuk kentang yang diterima.

Kekecewaan tersebut merupakan akumulasi dari penerimaan BPNT sejak mereka terdaftar sebagai KPM namun tidak berani melakukan protes terhadap agen.

"Kami khawatir bila tidak diteruskan dalam bentuk protes saja, hak kami sebagai penerima jelas diabaikan seolah ikhlas menerima. Karena keluhan kami di-

dengar, akhirnya kami-pun melaporkan ke polisi," tegas Ika, warga Cilongok.

Menurut warga, usai menerima paket sembako dari agen E Warung, saat dihitung komoditi sayuran jenis kentang jumlahnya tidak seperti biasanya. Kasus itu oleh warga KPM juga dilaporkan ke LSM pegiat anti korupsi.

LSM pegiat anti korupsi kemudian melakukan survei ke sejumlah wilayah Banyumas. Dari temuan survai tersebut diketahui jumlah komoditi kentang yang distribusikan kepada para KPM total se-

banyak 2,5 kg untuk dua tahap.

Sehingga untuk satu bulan, jumlah yang diberikan hanya 1,25 kg. Ini terjadi di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Sedang KPM di Kecamatan Purwokerto Utara, untuk penyuluran sayuran jenis kentang total seberat 3 kg.

Sedang untuk jenis telur hanya diterima KPM di Kecamatan Cilongok seberat 0,8 ons dari yang seharusnya 1 kg. Terkait dengan ada pengurangan kuantitas sayur dan telur ada dugaan indikasi tindakan korupsi. (Dri)